

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial, dan program-program pelayanan sosial. Seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi pembangunan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab, dan strategi penanggulangan masalah sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam arti luas, kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi di mana individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, layanan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka mencapai potensi maksimum mereka serta menikmati hidup yang bermakna, sehat, dan produktif. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga mencakup aspek emosional, fisik, dan psikologis.

Secara umum, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang memungkinkan individu dan kelompok masyarakat untuk mencapai

standar hidup yang layak dan bermartabat. Definisi ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial mencakup sistem dan program yang dirancang untuk mendukung individu dalam menghadapi tantangan kehidupan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Di Indonesia, istilah kesejahteraan sosial dirumuskan dalam UU RI No. 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 dalam Fahrudin (2014: 10), yang didefinisikan sebagai: “Kondisi terpenuhinya kebutuhan mental, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau tata kehidupan di mana setiap orang, setiap keluarga, setiap golongan atau masyarakat, selalu dapat merasakan adanya keselamatan lahir batin, maupun memenuhi kebutuhan hidupnya (baik material maupun spritual) serta menjalankan peran sosialnya dengan baik.

Definisi di atas mengatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan

sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Dari penjelasan tersebut maka pengertian kesejahteraan sosial mengandung pokok-pokok pikiran bahwa konsep kesejahteraan sosial merujuk pada:

- a. Kondisi statis atau keadaan sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
- b. Kondisi dinamis yaitu suatu kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi statis tersebut.
- c. Institusi, arena atau bidang berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup individu, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien. Menurut Scheneiderman (1972) dalam Fahrudin (2014: 10) tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu: “Pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem”. Dari ketiga tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat.

- b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut meliputi, mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

c. **Perubahan Sistem**

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1) Fungsi Pencegahan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang

Kesejahteraan sosial mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4 Nilai dan Prinsip Dasar Dalam Kesejahteraan Sosial

Menurut Zastrow dalam Adi (2005: 76) bahwa ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dan dielaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut adalah:

1. Pengetahuan (knowledge) - merupakan pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan, belajar dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktek serta pengembangan keterampilan.
2. Keterampilan (skill) - keterampilan merupakan kemampuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari praktek dan pengetahuan.

3. Nilai (value) - dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Komponen kesejahteraan sosial diatas menjelaskan bahwa dalam praktiknya para praktisi pekerja sosial dalam praktek pertolongannya menggunakan ketiga komponen tersebut. Disamping nilai-nilai diatas ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam praktek pekerja sosial. Menurut Maas (1997) dalam Adi (2005: 78) prinsip-prinsip kesejahteraan sosial adalah:

1. Penerimaan bahwa praktisi kesejahteraan sosial harus menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut.
2. Komunikasi, bahwa pekerja sosial harus mampu menangkap pesan atau keinginan dari klien dan mampu menggali permasalahan klien.
3. Individualisasi, yaitu pemahaman bahwa setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.
4. Partisipasi, yaitu ikut mengajak klien untuk turut serta berperan aktif dalam menghadapi masalah yang dihadapinya.
5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu menjaga kerahasiaan dari masalah yang dihadapi klien.
6. Kesadaran diri, yaitu praktisi kesejahteraan sosial harus mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan klien.

Prinsip-prinsip di atas adalah prinsip yang saling terkait satu dengan lainnya. Pembahasan prinsip kesejahteraan sosial diatas lebih erat kaitannya dengan intervensi

mikro. Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan dalam intervensi makro (pada level organisasi dan komunitas).

2.2 Pekerjaan Sosial

2.1.2 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang berawal dari perkembangan pemikiran dari para filantropis yang sekaligus juga merupakan relawan. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Penekanan pada aspek keberfungsian sosial manusia inilah yang menjadi pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya.

Pekerjaan sosial dikutip dari pertemuan Federasi Pekerja Sosial Internasional di Montreal, Kanada, Juli 2000, bahwa pekerja sosial adalah mempromosikan terciptanya perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia untuk mencapai derajat hidup yang lebih baik. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku sosial dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang fundamental bagi pekerjaan sosial.

Definisi pekerjaan sosial juga telah diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan pekerjaan sosial profesional sebagai berikut:

“Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”

Pengertian di atas terlihat bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya (environment), dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, guna meningkatkan taraf hidup (human well-being) masyarakat.

Pekerja sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial. Siporin juga mengatakan bahwa pekerja sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktis dan ilmiah. Dari definisi pekerjaan sosial tersebut, maka profesi pekerjaan sosial mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Pekerjaan sosial dinyatakan sebagai kegiatan profesional yang prakteknya berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi kemanusiaan, perubahan sosial, dan pemberdayaan.
- 2) Sasaran kegiatan pekerjaan sosial adalah individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah dalam memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.

- 3) Tujuan kegiatannya adalah mendorong pemecahan masalah bagi individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Peranan pekerjaan sosial sangat beragam, tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecahan masalah. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014: 66) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
- c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
- e. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.

- f. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- g. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- h. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Tujuan tersebutlah yang menjadi misi pekerja sosial didalam melakukan praktik pertolongan kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah. Dimana pekerja sosial berusaha untuk memelihara serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat.

2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial yang terencana. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut Adi (2005: 141) Metode yang digunakan oleh Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut sebagai berikut:

a. Social Case Work (Terapi Individu dan Keluarga)

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok

sasaran perubahan yang mempunyai masalah. Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam Adi (2005: 149) menggambarkan proses casework menjadi empat tahapan, adalah sebagai berikut:

1. Tahap penelitian, pada tahap ini klien mulai menjalani relasi dengan caseworker. Pada tahap ini selain mengumpulkan dan memilah data klien yang dapat dijadikan pegangan dalam proses pertolongan.
2. Tahap pengkajian, dari pengkajian yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan berbagai macam bentuk terapi.
3. Tahap intervensi, dalam tahapan ini sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat dikatakan sebagai treatment ketika proses ini sudah membantu klien untuk dapat mengklarifikasi permasalahannya dan berusaha melakukan perubahan kondisi kehidupan.
4. Tahap terminasi, fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara caseworker dan klien akan dihentikan.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menggali dan menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut.

b. Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode groupwork. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Menurut Skidmore, Tharckeray dan Farley dalam Adi (2005: 161) menyatakan groupwork sebagai:

A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people's needs for each other and their interdependence. Groupwork is a method of reducing and for accomplishing socially desirable purposes.

Metode groupwork merupakan metode yang berorientasi penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan dari metode group work dengan perspektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang dihadapi.

c. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas. Menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi (2005: 169) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai:

A movement design to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the initiative of the community. It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local government bodies.

Definisi di atas menyatakan bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat. Metode-metode di atas merupakan metode inti dalam pekerja sosial dan terdapat metode bantu yaitu aksi sosial, penelitian sosial dan pelayanan sosial.

2.2.4 Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan sebuah bidang profesi yang telah mengalami perkembangan selama lebih dari 50 tahun. Secara bertahap profesi ini mulai mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 mengenai pekerja sosial.

Pekerjaan sosial berfungsi sebagai suatu proses yang memberikan bantuan atau dukungan, dengan peranan yang disesuaikan dari tahap awal hingga akhir. Fungsi

pekerja sosial meliputi peran sebagai fasilitator, mediator, broker, pengarah, perencana, penyelesaian masalah, dan penilai. Semua ini bertujuan untuk memperkuat fungsi sosial dan melaksanakan peran sosialnya yang dapat diukur melalui strategi dalam pekerjaan sosial. Menurut pandangan Dubois dan Miley yang dikutip dalam Suharto (2009:5) adalah sebagai berikut :

1. Mengasah kemampuan individu dalam menghadapi tantangan yang sedang mereka hadapi.
2. Menghubungkan individu dengan sistem serta jaringan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan mendapatkan beragam sumber layanan serta peluang.
3. Meningkatkan kinerja lembaga sosial agar dapat memberikan layanan sosial dengan cara yang efektif, berkualitas, dan manusiawi.
4. Merumuskan dan mengembangkan regulasi serta peraturan yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial.

2.3 Partisipasi

2.3.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dan sukarela individu atau kelompok dalam suatu proses, seperti pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, khususnya dalam konteks pembangunan masyarakat, demokrasi, atau program sosial, di mana kontribusi berupa pikiran, tenaga,

waktu, keahlian, modal, atau sumber daya diberikan dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama sambil membangun rasa memiliki dan kohesivitas. Menurut para ahli seperti H.A.R. Tilaar (2005) partisipasi merupakan wujud pengembangan demokrasi melalui desentralisasi dan perencanaan bottom-up, sedangkan Soegarda Poerbakawatja menyebutnya sebagai gejala demokrasi di mana masyarakat ikut bertanggung jawab sesuai kemampuan, dan Sumaryadi menekankan bentuknya yang holistik mulai dari masukan ide hingga pemanfaatan hasil. Dalam ranah kesejahteraan sosial seperti pemberdayaan difabel yang menjadi minat Anda, partisipasi mendorong inklusi melalui proses identifikasi masalah hingga evaluasi perubahan, sebagaimana dijelaskan Isbandi sebagai keterlibatan aktif untuk mengatasi isu masyarakat secara efektif. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha (1990:14), partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.

Notoatmodjo dalam Budiardjo (2004:28) mengungkapkan bahwa di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya dan ide. Dalam hal ini berwujud 4M, yakni manpower (tenaga), money

(uang), material (benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan). Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 51), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi.

Partisipasi menurut Alwi Tawai dan M. Yusuf (2017) dalam buku Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Partisipasi sebagai wujud keterlibatan aktif masyarakat secara sadar, sukarela, dan menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan. Mereka menekankan bahwa partisipasi sejati tidak boleh dinilai sebatas kehadiran fisik masyarakat dalam sebuah kegiatan, melainkan harus menyentuh aspek keterlibatan mental dan emosional yang mendorong warga untuk menyumbangkan pemikiran, tenaga, maupun materi. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak lagi bersifat searah dari atas ke bawah (*top-down*), melainkan menjadi proses yang bergerak dari bawah (*bottom-up*) di mana masyarakat lokal diposisikan sebagai subjek utama yang memiliki hak demokratis untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, merencanakan solusi, mengeksekusi program, hingga mengevaluasi hasilnya.

Lebih lanjut, Tawai dan Yusuf (2017) menjelaskan bahwa proses partisipasi yang berjalan secara optimal secara alami akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab yang kuat di dalam diri masyarakat terhadap fasilitas atau program yang dibangun. Keterlibatan yang konsisten ini pada gilirannya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kepercayaan diri komunitas lokal untuk mengelola potensi serta sumber daya alam di wilayah mereka tanpa terus-menerus bergantung pada pihak luar.

Dalam jangka panjang, pemikiran dalam buku ini menegaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan suatu program pembangunan termasuk dalam sektor pengelolaan pariwisata berbasis komunitas sangat ditentukan oleh seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan kepada warga lokal untuk mengaktualisasikan diri dan mengontrol jalannya program tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan mengevaluasi program.

2.3.2 Bentuk Partisipasi

Partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011: 58), bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Menurut Ndraha (1990:103-104) bentuk partisipasi meliputi:

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Yadav dalam Theresia (2014: 198-199) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui di bukanya

forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Cohen dan Uphoff menyatakan ilmuwan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki wellbeing masyarakat. Hal tersebut memerhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

2.3.3 Tujuan Partisipasi

Tujuan utama peningkatan partisipasi (Depdiknas, 2005) adalah untuk :

1. Meningkatkan dedikasi kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa, pemikiran, intelektualitas, ketrampilan, moral, financial dan material barang.
2. Memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi pendidikan untuk pendidikan nasional.
3. Meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator, controller, resource linker, dan education proder.
4. menjamin tiap adanya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadi aspirasi stakeholders sebagai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2.3.4 Upaya Peningkatan Partisipasi

Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya –upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam rangka peningkatan partisipasi stakeholders adaah sebagai berikut :

1. Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin hak stekeholders yang dapat menjamin stekeholders untuk menyampaikan pendapat dalam egala proses pengambilan keputusan, pebuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian pendidikan di sekolah. dan pengawasan.

2. Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi agar stakeholders dapat mengutarakan pendapatnya atau pendapat mengepresikana keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum temu wicara,konsultasi, penyampaian pendapat secara tertulis maaupun lisan, partisipasi secara aktif dalam proses ppengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan pendidikan di sekolah. perencanaan, pengawasaan.
3. Melakukan advokasi, demokrasi, puklikkasi, komunikasi, transparansi, dan realitas terhadap stakeholders.
4. Melihat pertimbangan stakeholders relevansi secara proposional dengan keterlibatannya, batas-batas yuridisnya, kopetensinya, dan kompatibilitas tujuan yang akan dicapainya.

2.3.5 Tahap – Tahap dan Tingkat Partisipasi

Tjkroamidjoyo 1992 (Averroes 2009 : 45) membagi partisipasi menjadi tiga tahapan:

1. Partisipasi atau kerlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Kerterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan”.

Menurut Sherry R Arnstein (1969) yang membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan, di antaranya adalah control warga negara (citizen control): pada tataran ini public berwenang memutuskan, melaksanakan, dan

menngawasi pengelolaan sumber daya. Setelah itu delegasi kewenangan (*delegate power*) kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan kemitraan (*partnership*): ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan menganmbil keputusan bersama-sama. Secara lebih lengkap tingkatan partisipasi yang diajukan Arnstein 1969(Averroes 2009 :47) dalam tulisannya *A Ladder of Citizen Participation* adalah sebagai berikut :

Partisipasi menurut Tjokroamidjojo (1992) mengatakan terdapat 4 (empat) aspek penting dalam pembangunan, yaitu:

Pertama, terlibat dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik suatu Negara turut menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung dari sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintah yang berlaku bagi suatu negara.

Keempat, masyarakat akan memberikan partisipasi secara aktif apabila ada perumusan dan pelaksanaan program - program tersebut yang menyentuh kepentingan mereka secara langsung untuk meningkatkan kemakmuran.

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sebab dalam diri mereka ada keinginan dan kegairahan untuk merubah masa depannya agar lebih baik. Keinginan serta kegairahan tersebut harus dapat terwujud, sebab usaha-usaha dari pembangunan itu langsung menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Ada dua factor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers (1991) yaitu : pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir. Kedua, Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang manfaat pembangunan tersebut secara merata.” tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung dapat mereka rasakan.

2.4 Keberfungsian Sosial

2.4.1 Pengertian Keberfungsia Sosial

Keberfungsian sosial (*social functioning*) menurut Boehm merupakan terma teknikal yang mendukung fokus profesi pekerjaan sosial pada transaksi-transaksi manusia dalam lingkungannya. Hal ini merujuk kepada kemampuan klien untuk

melaksanakan tugas kehidupannya sehari-hari (termasuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan transportasi) dan memenuhi peranan-peranan sosial utamanya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat atau subbudaya klien (Karls & Wandrei, 1994).

Menurut saya tanpa memahami konsep keberfungsian sosial maka seorang pekerja sosial tidak akan dapat membedakan antara dirinya dengan profesi lain, dan dia kehilangan identitas diri dan profesinya. Pentingnya konsep keberfungsian sosial ini dipertegas lagi oleh Morales dan Sheafor (1999) dengan mengatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan sebuah konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya seperti yang dikemukakan mereka sebagai berikut:

Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that person's world that the quality of life can be enhanced or damaged.

Konsep keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik orang dalam konteks lingkungan sosialnya. Siporin (1979) mengemukakan bahwa: "*social functioning refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities, and so on) behave in order to carry out their life task and meet their*

needs" (hal. 17). Keberfungsian sosial menunjuk pada cara-cara individu- individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu keberfungsian seseorang sangat berkaitan dengan peranan-peranan sosialnya sehingga keberfungsian sosial dapat pula diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dalam menampilkan beberapa peranan yang diharapkan atau yang seyogianya ditampilkan oleh setiap orang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial.

Keberfungsian sosial positif adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas yang khusus (Karls & Wandrei, 1998; Longres, 1995). Peranan sosial yang utama yaitu menjadi anggota dalam keluarga, orang tua, pasangan, mahasiswa, pasien, pegawai, tetangga dan warga negara. Peranan sosial orang berubah melalui kehidupan dan harapan tentang peranan ini berbeda tergantung kepada gender orang, suku bangsa, budaya, agama, pekerjaan dan komunitas. Sebagian ahli berpendapat bahwa konsep keberfungsian sosial terfokus pada keserasian antara kapasitas individu dengan tindakan dan tuntutan, harapan, sumber-sumber serta kesempatan dalam lingkungan sosial dan ekonominya.

Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan. Pada dasarnya masyarakat yang rentan ini adalah korban dari situasi

pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan. Termasuk juga di dalamnya anak-anak dan remaja, lansia, perempuan, individu yang hidup dalam kemiskinan, individu yang mempunyai keterbatasan fisik, orang yang sakit mental dan emosional, gay dan lesbian, dan kelompok minoritas.

Melaksanakan komitmen dalam meningkatkan keberfungsian sosial orang, pekerja sosial menangani penyediaan intervensi sosial bagi mereka yang mempunyai keterbatasan kapasitas dan kesempatan untuk berfungsi secara penuh. Pelayanan intervensi sosial mungkin menjadi penanganan yang paling menolong. Akhirnya, karena orang mungkin ingin meningkatkan keberfungsian sosialnya ketika dia sedang menghadapi masalah yang membelitnya, maka pekerja sosial perlu memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada orang tersebut. Intervensi sosial dapat meliputi tindakan dan upaya yang dirancang agar orang dapat memenuhi kebutuhan dan akses terhadap kebutuhan dasar (misalnya makan, tempat tinggal, perlindungan dari bahaya, dan sebagainya) dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan psikososial seperti rasa memiliki, penerimaan dan ketenangan pada saat mengalami tekanan. Dalam intervensi pekerjaan sosial, fokusnya adalah menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan atau menolong klien agar bisa merasa nyaman walaupun sedang mengalami kesulitan.

Secara umum keberfungsian sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu, dalam menyesuaikan diri dan mengatasi masalah lingkungan sosialnya, sehingga memberikan hasil yang bermanfaat bagi dirinya yang dihadapinya.

Hal ini berkaitan erat dengan interaksi antara individu dengan dan orang lain. Faul (1995) mengemukakan definisi keberfungsian sosial sebagai berikut:

Social functioning relates to the behavioral patterns of the individual in the different roles and system that the individual forms part of his environment. The individual reacts with congruence among the four dimensions of his inner world situations in his environment. The individual experiences himself and his world distinct levels that relate to achievement, satisfactions and expectation on the one hand to frustrations, stress and helplessness on the other hand. Optimal social functioning assumes that the positive forces will be stronger than the regressive forces. The social functioning of the individual always takes place in a specific time frame that is integrated with the developmental phase in which the individual is functioning.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian sosial memiliki enam buah indikator yaitu, indikator positif (pencapaian, kepuasan dan pengharapan) dan indikator negatif (stres, kekecewaan, ketidakberdayaan). Keberfungsian sosial seseorang dinilai optimal apabila aspek positif tersebut lebih kuat dibandingkan dengan aspek negatifnya pada saat pengukuran dilakukan.

2.4.2 Karakteristik Keberfungsian Sosial

Fokus atau pusat perhatian pekerjaan sosial yaitu social functioning atau keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian sosial orang, kelompok atau masyarakat. Definisi ke empat walaupun tidak menyebut keberfungsian sosial, secara tersirat juga

tetap mempunyai fokus pada keberfungsian sosial orang. Hal ini tersirat dalam pernyataan bahwa pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Bartlett (1970) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Menurut Bartlett keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu. Kalau terjadi ketidakimbangan antara keduanya maka terjadi masalah, misalnya tuntutan lingkungan melebihi kemampuan mengatasi yang dimiliki individu.

Pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasinya oleh individu.

Tuntutan (*demands*) —————> Kemampuan mengatasi (*coping*)

Siporin (1975) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang, karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, setiap orang diminta untuk

melakukannya. Peranan sosial, misalnya peranan sebagai suami, adalah pola tugas yang diharapkan dan perilaku lain yang berhubungan dengan status sosial. Setiap orang menduduki beberapa status sosial sekaligus, misalnya status sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai warga masyarakat, dan sebagainya. Setiap status sosial disertai oleh peranan sosial tertentu, dan pelaksanaan peranan-peranan sosial ini menunjukkan keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial.

2.4.3 Cara Mencapai Keberfungsian Sosial

Untuk mencapai keberfungsian sosial maka peranan sumber daya menjadi sangat penting. Kesempatan dan sumber-sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sehingga memungkinkan pencapaian keberfungsian sosial internal sebagaimana mestinya. Seseorang dapat dikatakan berfungsi sosial apabila ia mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya melalui tiga cara yaitu:

1. Individu mampu menjalankan peranannya dengan baik. Peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan ke atas orang yang memegang peranan itu. Dalam hal ini individu dapat mengefektifkan segala sesuatu yang diharapkannya untuk diwujudkan secara konkret.

2. Individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Ia mampu membuat keputusan yang rasional, dapat dipercaya dan mampu berupaya untuk kesejahteraan orang lain. Hal-hal yang dicapainya akan dijadikan modal untuk kegiatan selanjutnya.
3. Individu memperoleh kepuasan diri dari penampilan atau kinerjanya dan tugas-tugasnya serta pelaksanaan tanggung jawabnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang mengalami bersangkutan dikatakan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kondisi seperti ini dapat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kekurangan sumber-sumber internal

Kondisi tersebut mengakibatkan seseorang memiliki harapan yang semu, kebutuhan fisik dan psikis tidak terpenuhi, serta ketidakberdayaan dalam hidupnya. Secara situasional sumber-sumber internal diperlukan untuk membangun semangat individu dalam melangsungkan kehidupannya.

2. Pengaruh negatif faktor lingkungan

Kondisi tersebut berkaitan dengan perkembangan pengetahuan kemajuan teknologi dan yang tidak seimbang dengan kemampuan individu dalam menerimanya. Keterbatasan individu untuk memperoleh informasi, mengolah dan memilah hal-hal yang bermanfaat mengakibatkan lemahnya kontrol sosial terhadap dampak negatif kemajuan tersebut. Hal ini

memerlukan penyeimbangan antara peningkatan kemampuan individu sehingga dapat memilah hal-hal yang positifnya saja.

3. Kombinasi antara faktor personal dan lingkungan

Kondisi tersebut merupakan gabungan dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh faktor internal individu dan pengaruh lingkungan. Kombinasi masalah seperti ini memiliki dampak yang lebih kompleks terhadap terganggunya keberfungsian sosial seseorang.

2.5 Pemberdayaan Berbasis Wilayah

Kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam kegiatan pemberdayaan. Potensi yang ada di masyarakat untuk bisa diberdayakan terdiri dari potensi yang dimiliki individu, potensi kelompok, dan juga potensi yang dimiliki oleh alam, sosial dan budaya yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Setiap individu memiliki kebutuhan dan potensi berbeda. Potensi individu yang dikembangkan cenderung beragam. Begitu pula potensi kelompok cenderung antar kelompok berbeda. Lain halnya dengan potensi wilayah yang memiliki kesamaan bagi individu yang ada di wilayah tersebut.

Pemberdayaan didasarkan pada potensi wilayah (alam, sosial, budaya) sekitar masyarakat. Jika daerah memiliki potensi alam atau sumberdaya alam yang baik untuk dikembangkan, maka kegiatan pemberdayaan mengacu pada potensi tersebut. Begitu pula potensi lingkungan sosial dan budaya dapat dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha memanfaatkan sumber daya alam,

sosial, dan budaya yang dimiliki menjadi awal yang baik untuk mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan. Menggali potensi tersebut pada tahap ini perlu mempertimbangkan budaya dan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan cara ini pemberdayaan akan lebih mudah dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat. Di sisi lain budaya dan kearifan lokal akan tetap lestari.

Pemberdayaan berbasis potensi alam juga harus memper- timbangkan aspek kelestarian lingkungan. Eksploitasi potensi alam secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan (alam, sosial, budaya) bukan merupakan kegiatan pemberdayaan, tetapi hal tersebut merupakan bentuk kejahatan walaupun mendapatkan keuntungan finansial. Lingkungan harus menjadi prioritas untuk lestari, karena hakikat dari kegiatan pemberdayaan adalah menuju pada kemandirian masyarakat.

Pengembangan potensi alam atau sumberdaya alam harus berbasis pada pengolahan potensi sumberdaya lokal dalam struktur industri. Kegiatan seperti eksploitasi sumberdaya alam yang dijual langsung dalam kondisi mentah ke pasar sulit untuk dapat mendorong kemandirian masyarakat. Seharusnya sebelum dijual, potensi sumber daya lokal tersebut dilakukan pengolahan menjadi barang setengah jadi atau diupayakan menjadi barang jadi.

Mengubah kebiasaan dalam komunitas masyarakat untuk mengolah sumberdaya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesungguhnya adalah sangat menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh tersebut, di antaranya:

- a. Komoditas barang jadi atau setengah jadi nilainya jauh lebih berharga dari pada bahan mentah, sehingga akan meningkatkan pendapatan secara signifikan.
- b. Mengurangi pengangguran karena lapangan kerja bertambah. Tahapan atau proses produksi pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi memerlukan tenaga kerja.
- c. Kemampuan dan keterampilan masyarakat akan meningkat seiring tuntutan kemampuan dalam pengolahan sumber daya alam tersebut.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan akan meningkat, seiring dengan tuntutan dan perkembangan pasar.
- e. Kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan meningkat seiring meningkatnya kemampuan, keterampilan, dan pendapatan mereka.
- f. Pada akhirnya masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera.

Beberapa sumber daya alam, sosial dan budaya daerah juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Wilayah pegunungan, air terjun, pantai, danau, atau tempat-tempat menarik lainnya dapat didorong dan ditata menjadi tujuan wisata. Begitu pula adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal yang unik merupakan potensi besar untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Pengembangan potensi wilayah wisata ini dapat menjadi sumberdaya yang potensial untuk: mendatangkan penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta dapat mengkondisikan sikap dan

perilaku masyarakat yang dinamis untuk berkembang. Pengembangan daerah wisata ini secara ekonomi dapat dikembangkan dengan tujuan menarik wisatawan (lokal maupun mancanegara) untuk datang, menciptakan wisatawan nyaman sehingga lama tinggal di tempat wisatawan, serta bagaimana supaya mereka dapat membelanjakan uangnya di tempat wisata tersebut.

Untuk mewujudkan daerah wisata ini, dimulai dengan membangun masyarakatnya di daerah tersebut sebagai modal dasar. Masyarakat disadarkan akan potensi daerah untuk dikembangkan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Komponen	Keterangan
1.	Nama Penulis	Ade Arqam Hidayat
	Judul Artikel	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kampung Lengkong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
	Nama Jurnal	Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata
	Volume	Volume 3, No. 2 Maret 2022
	Metode	Pendekatan Kualitatif
	Hasil	Perlunya model pengelolaan adaptif, optimalisasi peran desa dalam pariwisata berkelanjutan, dan inovasi produk lokal untuk meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat.
	URL/DOI	DOI : 10.31334/jd.v3i2.2208 https://doi.org/10.31334/jd.v3i2.2208
2.	Nama Penulis	Agustina Setiawan, Utang Suwaryo, Mudiwati Rahmatunnisa
	Judul Artikel	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung
	Nama Jurnal	Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
	Volume	Volume 3, No. 2 (2020)
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur

		formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung.
	URL/DOI	DOI : 10.36859/jap.v3i2.197 https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/197
3.	Nama Penulis	Muhammad Rezqy Kurniawan, Rike Anggun Artisa
	Judul Artikel	Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Studi Kasus : Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
	Nama Jurnal	Inovasi Pembangunan
	Volume	Volume 11 No. 01 (2023)
	Metode	Kualitatif Deskriptif
	Hasil	Efektif meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran seperti probing prompting, cooperative trio exchange, dan problem based learning.
	URL/DOI	DOI : 10.35450/jip.v11i01.349 https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.349
4.	Nama Penulis	Danil Julio Sitompul, Bambang Shergi Laksmono
	Judul Artikel	Strategi Peningkatan Masyarakat Dalam Program Kang Pisman Di Kota Bandung
	Nama Jurnal	Jurnal Kajian Pemerintah
	Volume	Volume 10, No. 1 (2024)
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Program pemberdayaan berbasis kelompok berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata peserta sebesar 35% setelah 6 bulan intervensi melalui pelatihan keterampilan UMKM dan akses modal usaha.
	URL/DOI	DOI : 10.25299/jkp.2024.vol10(1).15044 https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/15044
5.	Nama Penulis	Lorenza R. Radjabaycolle, Sumardjo
	Judul Artikel	Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cikapundung di Kelurahan Dago Bandung
	Nama Jurnal	Jurnal Penyuluhan
	Volume	Volume 10, No.1 (2014)
	Metode	Survei Deskriptif
	Hasil	Partisipasi masyarakat Desa Dago tergolong cukup baik, dengan kecenderungan sikap positif terhadap pengelolaan DAS melalui kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan infrastruktur, dan pengawasan lingkungan.
	URL/DOI	DOI : 10.25015/penyuluhan.v10i1.9912 https://journal.ipb.ac.id/jupe/article/view/9912

6.	Nama Penulis	Balqis Nadhifatur Rifdah, Susilo Kusdiwanggo
	Judul Artikel	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis
	Nama Jurnal	Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia
	Volume	Volume 13 No. 2 (2024)
	Metode	Systematic Literature Review (SLR)
	Hasil	Partisipasi sosial dalam pengembangan Kawasan wisata yaitu dukungan pemerintah, keunggulan objek wisata, keterlibatan komunitas, serta pendampingan pelatihan memiliki peran yang signifikan.
	URL/DOI	DOI : 10.32315/jlbi.v13i2.358 https://iplbijournals.id/index.php/jlbi/article/view/358
7.	Nama Penulis	Febrianto Hakeu, Mohamad Steven Alim
	Judul Artikel	Partisipasi Masyarakat Dalam Pencapaian SDGs Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Nama Jurnal	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
	Volume	Volume 3 No. 1 (2024)
	Metode	Metode Demonstrasi
	Hasil	Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
	URL/DOI	DOI : 10.31314/mohuyula.3.1.1-9.2024 https://journal.umgo.ac.id/index.php/Mohuyula/article/view/2808
8.	Nama Penulis	Fikri Anarta, Rudi Saprudin Darwis
	Judul Artikel	Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Bagian Dari Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata
	Nama Jurnal	Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial
	Volume	Volume 7 No. 2 (2024)
	Metode	Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>)
	Hasil	Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism) sangat penting karena menempatkan warga lokal sebagai subjek utama, sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas pencapaian tujuan, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial dirasakan langsung oleh masyarakat setempat
	URL/DOI	DOI : 10.24198/focus.v7i2.59114 https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/59114
9.	Nama Penulis	Heri Wibowo, Aditya Candra Lesmana, Wahyu Gunawan R, Nunung Nurwati, Hadiyanto Abdul Rachim, Desi Yunita, Muhammad Fedryansyah, Ardi Maulana Nugraha

	Judul Artikel	Edukasi Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Keberfungsian Sosial Masyarakat Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
	Nama Jurnal	Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
	Volume	Volume 4 No. 3 (2023)
	Metode	Pendekatan Participatory Action Research (PAR)
	Hasil	Penerapan edukasi berbasis hybrid learning dan kolaborasi modal sosial lokal berhasil menjaga keberlanjutan belajar anak saat bencana banjir, sekaligus meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua demi tercapainya keberfungsian sosial keluarga.
	URL/DOI	DOI : 10.24198/jppm.v4i3.51582 https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/51582
10.	Nama Penulis	Asep Risman, Budhi Wibhawa, M. Fedryansyah
	Judul Artikel	Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
	Nama Jurnal	Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
	Volume	Volume 3 No. 1 (2016)
	Metode	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan menaikkan taraf kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal.
11.	URL/DOI	DOI : 10.24198/JPPM.V3I1.13622 https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13622
	Nama Penulis	Pramitha Salsabila, Annisah Annisah
	Judul Artikel	Pemenuhan Keberfungsian Sosial Pada Perempuan Generasi Sandwich
	Nama Jurnal	Jurnal Sains Sosial dan Humaniora
	Volume	Volume 7 No. 2 (2023)
	Metode	Kualitatif Deskriptif
12.	Hasil	Meskipun rentan menghadapi konflik peran ganda, perempuan generasi sandwich berhasil memenuhi keberfungsian sosialnya dengan menggunakan strategi koping yang fokus pada penyelesaian masalah (problem-focused coping).
	URL/DOI	DOI : 10.30595/jssh.v7i2.15137 https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JSSH/article/view/15137
	Nama Penulis	Wirda Amalia, Safrizal, Teuku Zulyadi
	Judul Artikel	Pelayanan Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Keberfungsian Sosial Disabilitas Netra di UPTD Rumoh

		Seujahtera Beujroh Meukarya (RSBM) Ladong Aceh Besar
	Nama Jurnal	Jurnal Intervensi Sosial
	Volume	Volume 3 No. 1 (2024)
	Metode	Kualitatif Deskriptif
	Hasil	Pelayanan sosial di UPTD RSBM yang berbasis asrama (boarding) melalui bimbingan mental, sosial, fisik, dan keterampilan terbukti efektif memulihkan serta memenuhi keberfungsian sosial para disabilitas netra.
	URL/DOI	DOI : 10.32734/intervensisosial.v3i1.17051 https://talenta.usu.ac.id/is/article/view/17051
13.	Nama Penulis	H. Wibowo, Maulana Irfan, Sahadi Humaedi
	Judul Artikel	Edukasi Keberfungsian Sosial Masyarakat Melalui Platform Digital
	Nama Jurnal	Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial
	Volume	Volume 4 No.2 (2021)
	Metode	Kualitatif Deskriptif
	Hasil	Pemanfaatan berbagai platform digital, seperti YouTube, Instagram, dan website efektif menjadi sarana alternatif untuk memberikan edukasi sosial yang bersifat preventif dan promotif guna membangun kembali keberfungsian sosial masyarakat di masa krisis atau pandemi.
	URL/DOI	DOI : 10.24198/focus.v4i2.31910 https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/31910
14.	Nama Penulis	Farah Tri Apriliani, Hery Wibowo, Maulana Irfan
	Judul Artikel	Model Keberfungsian Sosial Masyarakat Pada Kehidupan Normal Baru
	Nama Jurnal	Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
	Volume	Volume 2 No.2 (2020)
	Metode	Kualitatif Studi Kasus
	Hasil	Keluarga dengan anak disabilitas intelektual mampu mempertahankan keberfungsian sosialnya secara optimal berkat adanya pembagian peran yang adaptif, strategi koping yang positif, serta dukungan sosial (social support) yang kuat dari lingkungan sekitar.
	URL/DOI	DOI : 10.24198/jkrk.v2i2.29123 https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29123
15.	Nama Penulis	Tintin Febrianti
	Judul Artikel	Analisis Perbandingan Konsep Keberfungsian Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Wilayah Pesisir
	Nama Jurnal	Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis
	Volume	Volume 1 No. 1 (2015)
	Metode	Kualitatif Studi Literatur

Hasil	Paradigma keberfungsian sosial efektif mengatasi kemiskinan nelayan karena memandang mereka sebagai subjek aktif yang mampu mengoptimalkan modal sosial dan sumber daya lokal, alih-alih hanya berfokus pada indikator ketiadaan pendapatan.
URL/DOI	DOI : 10.25157/ma.v1i1.34 https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/mimbaragribisnis/article/view/34

Kajian terhadap 15 penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan aktif warga sebagai subjek utama dalam pariwisata berbasis masyarakat sangat krusial untuk menciptakan pengelolaan yang adaptif dan menjamin keberlanjutan ekonomi lokal (Hidayat, 2022; Rifdah & Kusdiwanggo, 2024; Anarta & Darwis, 2024). Partisipasi yang didukung oleh pemerintah dan kelembagaan desa ini terbukti memberikan kontribusi riil dalam membuka lapangan kerja serta meningkatkan taraf kesejahteraan sosial-ekonomi (Radjabaycolle & Sumardjo, 2014; Setiawan dkk., 2020; Risman dkk., 2016). Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan tersebut erat kaitannya dengan dimensi keberfungsian sosial, di mana masyarakat yang berdaya mampu mengoptimalkan modal sosial, beradaptasi dengan baik, dan menggunakan strategi koping yang positif untuk mempertahankan kualitas hidup mereka (Salsabila & Annisah, 2023; Wibowo dkk., 2023; Feibrianti, 2015).

Meskipun kedua tema tersebut telah banyak diteliti, mayoritas riset terdahulu masih mengkaji partisipasi wisata dan keberfungsian sosial secara terpisah, atau meletakkan isu keberfungsian sosial hanya pada ranah klinis, disabilitas, dan kebencanaan. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian berjudul "Hubungan Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Wisata Puncak Pasir Ipis dengan Keberfungsian

Sosial Warga di Desa Cibeusi" ini. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan menguji dan mengorelasikan secara langsung apakah tingkat partisipasi warga dalam mengelola objek wisata lokal berhubungan langsung dengan kapasitas keberfungsian sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari.

2.7 Kerangka Pemikiran

KERANGKA PEMIKIRAN

